



Peran Inovasi UMKM Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Keysia Jesika Intansari¹, Inaya Regita Cahyani², Indah Prabawati³, Firre An Suprpto⁴
^{1,2,3,4} Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
¹25040674091@mhs.unesa.ac.id, ²25040674132@mhs.unesa.ac.id*, ³indahprabawati@unesa.ac.id*,
⁴firresuprpto@unesa.ac.id*

Abstrak

Inovasi UMKM dipandang sebagai instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, namun kontribusinya terhadap keberlanjutan pertumbuhan secara holistik masih belum terpetakan secara memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi inovasi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Bantul dari dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta mengidentifikasi hambatan implementatif yang membatasi optimalisasinya. Metode yang digunakan adalah analisis dokumen kualitatif (Bowen, 2009) terhadap ± 25 sumber sekunder yang mencakup data BPS Kabupaten Bantul periode 2022–2025, laporan kelembagaan, dan kajian akademik relevan. Analisis dilakukan secara integratif menggunakan tiga kerangka: rantai kausalitas inovasi UMKM, Triple Bottom Line Elkington (1997), dan implementasi kebijakan Edwards III (1980).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi UMKM berkontribusi positif terhadap pertumbuhan PDRB dan penurunan kemiskinan, namun belum memenuhi kriteria keberlanjutan yang holistik. Dimensi sosial merupakan capaian terkuat, sedangkan dimensi lingkungan belum tertanam secara sistematis dalam kebijakan inovasi UMKM. Pada tataran implementasi, ditemukan tiga kelemahan struktural: jangkauan komunikasi kebijakan yang belum merata, insufisiensi kapasitas pendampingan lapangan, serta fragmentasi koordinasi antarinstansi pengelola platform SiDAKUI, GAMPIL, dan SiBakul tanpa mekanisme lintas-OPD yang terdokumentasi.

Kata Kunci: Inovasi UMKM, Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, Triple Bottom Line, Implementasi Kebijakan, Kabupaten Bantul.

1. Pendahuluan

Perubahan dalam perekonomian global berlangsung secara cepat dan kompleks, ditandai dengan percepatan digitalisasi serta meningkatnya tuntutan terhadap pembangunan berkelanjutan. Kondisi ini mendorong setiap negara untuk beradaptasi terhadap dinamika teknologi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks tersebut, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi melalui kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan (OECD, 2021; Tambunan, 2019). Di Indonesia, UMKM juga menunjukkan ketahanan yang relatif tinggi dalam menghadapi krisis ekonomi, sehingga menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional maupun daerah.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah dengan potensi UMKM yang besar, dengan jumlah unit usaha mencapai sekitar 96.360 pada tahun 2025 yang didominasi oleh sektor makanan dan kerajinan. Namun demikian, besarnya jumlah UMKM tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan kemiskinan yang signifikan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul menurun dari 14,04% pada tahun 2021 menjadi sekitar 11,6% pada tahun 2025–2026, namun masih berada di atas target penurunan di bawah 10%. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi UMKM terhadap pengentasan kemiskinan masih belum optimal dan menghadapi berbagai keterbatasan struktural.

Keterbatasan tersebut salah satunya berkaitan dengan rendahnya kapasitas inovasi dan pemanfaatan teknologi digital. Rata-rata omzet bulanan UMKM yang relatif rendah menunjukkan adanya keterbatasan dalam penciptaan nilai tambah. Di sisi lain, adopsi teknologi digital masih terbatas, di mana hanya sebagian kecil pelaku usaha yang memanfaatkan platform daring untuk pemasaran. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi UMKM dengan kemampuan transformasi digital yang dimiliki, yang pada akhirnya berdampak pada daya saing dan keberlanjutan usaha (Khourouh et al., 2021). Sejumlah penelitian terdahulu telah mendekati persoalan ini dari sudut pandang yang beragam, namun masing-masing bersifat parsial. Nursini (2020) membuktikan bahwa kanal utama kontribusi UMKM terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia adalah

penyerapan tenaga kerja, bukan peningkatan produktivitas temuan yang menjelaskan mengapa pertumbuhan kuantitas UMKM tidak selalu berkorelasi dengan penurunan kemiskinan yang signifikan.

OECD (2021) menegaskan bahwa digitalisasi UMKM hanya menghasilkan dampak optimal dalam ekosistem kebijakan yang inklusif dan terkoordinasi. Pada tataran hambatan struktural, Munawara et al. (2025) mengidentifikasi minimnya akses pembiayaan dan lemahnya literasi digital sebagai bottleneck yang bersifat sistemik. Di tingkat lokal, Sujarwo (2022) membuktikan pengaruh positif inovasi produk dan e-commerce terhadap kinerja UMKM kerajinan Bantul, sedangkan Maulidasari dan Damrus (2024) menilai platform SiBakul efektif dalam konteks pembinaan terstruktur meski analisisnya terbatas pada platform tunggal tanpa menyentuh koordinasi kebijakan yang lebih luas.

Dari (2024) menambahkan bahwa praktik bisnis berkelanjutan berbasis Triple Bottom Line pada UMKM DIY masih berada pada level sedang, dengan dimensi lingkungan sebagai yang paling lemah mengindikasikan defisit keberlanjutan yang belum mendapat respons kebijakan memadai. Pada tataran implementasi, Jurnal Media Akademik (2025) mengidentifikasi kesenjangan sistemik antara komitmen kebijakan digitalisasi UMKM di level pimpinan dengan realisasi di lapangan sebagai pola yang berulang di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut secara kolektif belum menjawab tiga celah analitis yang krusial. Pertama, belum ada kajian yang secara terpadu mengukur kontribusi inovasi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus mengevaluasi keberlanjutannya dari tiga dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu kerangka analisis.

Kedua, dimensi lingkungan dalam pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM secara konsisten absen dari kajian kebijakan di tingkat kabupaten. Ketiga, hambatan implementasi kebijakan inovasi UMKM belum dianalisis secara sistemik menggunakan kerangka yang mampu menghubungkan desain kebijakan dengan realitas pelaksanaan lapangan. Penelitian ini mengisi ketiga celah tersebut melalui integrasi tiga kerangka analisis secara simultan: rantai kausalitas inovasi UMKM, Triple Bottom Line Elkington (1997), dan implementasi kebijakan Edwards III (1980).

Pendekatan lintas-kerangka ini merupakan novelty penelitian yang belum diterapkan pada konteks UMKM daerah di Indonesia, dengan kontribusi teoretis berupa pengujian relevansi integratif ketiga kerangka dalam menjelaskan kesenjangan antara pertumbuhan agregat dan keberlanjutan holistik, serta kontribusi praktis berupa diagnosis implementatif yang dapat dijadikan basis perumusan kebijakan inovasi UMKM yang lebih adaptif dan terukur. Berdasarkan identifikasi celah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi inovasi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Bantul dari dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta mengidentifikasi hambatan implementatif yang membatasi optimalisasi kontribusi tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode analisis dokumen (Bowen, 2009). Unit analisis mencakup kebijakan UMKM, program digitalisasi, dan indikator ekonomi daerah di Kabupaten Bantul. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bantul periode 2022–2025 terkait PDRB dan kemiskinan, dokumen kebijakan dan program UMKM (SiDAKUI, GAMPIL, SiBakul), serta artikel ilmiah dan laporan penelitian relevan. Sebanyak ±25 dokumen dianalisis yang diterbitkan dalam rentang tahun 2019–2025. Pemilihan data dilakukan secara purposive berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas, dan keterbaruan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Prosedur penelitian meliputi tiga tahap yakni identifikasi dan seleksi dokumen, klasifikasi data berdasarkan tema inovasi, digitalisasi, dan indikator ekonomi, serta analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) mengacu pada Bowen (2009). Kerangka analisis menggunakan Triple Bottom Line untuk mengklasifikasikan dimensi keberlanjutan (profit, people, planet) dan model implementasi kebijakan Edwards III untuk mengidentifikasi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan pembacaan berulang hingga diperoleh konsistensi temuan.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pola Inovasi UMKM Dan Kontribusinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dalam kerangka yang diadopsi penelitian ini, mengacu pada peningkatan kapasitas produktif daerah secara inklusif dan berkesinambungan tidak sekadar pertumbuhan output jangka pendek, melainkan transformasi struktural yang didorong oleh inovasi, penyerapan tenaga kerja produktif, dan penguatan daya saing lokal (Romer, 1990; OECD, 2021). Dalam konteks ini, inovasi UMKM menjadi variabel penjelas sentral: melalui penciptaan nilai tambah baru, UMKM yang berinovasi berkontribusi pada peningkatan PDRB daerah sekaligus memperluas inklusi ekonomi bagi kelompok rentan.

Secara makro, PDRB Kabupaten Bantul atas dasar harga berlaku (ADHB) pada 2024 mencapai Rp36,48 triliun, tumbuh 5,04% dibandingkan tahun sebelumnya Rp34,01 triliun (BPS Kabupaten Bantul, 2024; Databoks/Katadata, 2026). Sektor industri pengolahan yang di Bantul sebagian besar digerakkan oleh UMKM kerajinan dan industri makanan-minuman mencatat nilai PDRB Rp5,14 triliun dan tumbuh 3,75%, menjadikannya sektor penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Bantul.

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga didominasi UMKM turut mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 8,21% (BPS Kabupaten Bantul, 2024, dikutip dalam Databoks/Katadata, 2026). Konteks makro ini mengindikasikan bahwa UMKM bukan sekadar pelengkap struktur ekonomi daerah, melainkan penggerak utama pertumbuhan PDRB Bantul yang relevansinya semakin meningkat seiring intensifikasi inovasi. Kepala Dinas KUKMPP Bantul, Agus Sulistiyana, menegaskan bahwa digitalisasi UMKM diinkubasi mulai dari aspek produksi yang digital, desain produk, desain kemasan, hingga pemasaran digital (Antara News Yogyakarta, 2022).

Hal ini diperkuat oleh pernyataan resmi Pemerintah Kabupaten Bantul (2023) yang mendorong pelaku UMKM untuk melakukan inovasi produk sekaligus go digital hingga go internasional. Dalam konteks UMKM kerajinan di Bantul, Sujarwo (2022) membuktikan bahwa inovasi produk dan adopsi e-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM sentra kerajinan kulit Manding Bantul. Ketiga pola inovasi tersebut inovasi produk dan desain kemasan, inovasi proses produksi berbasis digital, serta inovasi pemasaran digital sejalan dengan konsep creative destruction Schumpeter (1934) dan kerangka keunggulan bersaing Porter (1985) yang menekankan penciptaan nilai tambah sebagai kunci daya saing usaha yang berkelanjutan.

Inovasi UMKM berkontribusi pada penurunan kemiskinan melalui dua jalur utama yakni penyerapan tenaga kerja lokal yang menyerap kelompok masyarakat rentan, serta peningkatan pendapatan riil pelaku usaha yang memperluas kapabilitas ekonomi individu (Sen, 1999). Berdasarkan pemberitaan Harian Jogja, DKUKMPP Bantul mencatat jumlah UMKM telah menembus 96.420 unit dengan rata-rata omzet bulanan Rp446.107, didominasi sektor makanan dan kerajinan sebagai penggerak utama ekonomi lokal (Leon, 2025). Data BPS Kabupaten Bantul menunjukkan tren penurunan kemiskinan yang konsisten selama periode pengamatan sebagaimana tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul 2022–2025

Tahun	Kemiskinan (%)	Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Perubahan (pp)
2022	12,27	130,13	—
2023	11,96	128,51	-0,31
2024	11,66	126,93	-0,30
2025	11,54	±127,00	-0,12

Meskipun tren penurunan bersifat konsisten, laju penurunan yang melambat dari 0,31 persen poin (2022–2023) menjadi hanya 0,12 persen poin (2024–2025) mengindikasikan bahwa pertumbuhan kuantitas UMKM semata tidak cukup untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan menopang pertumbuhan ekonomi yang benar-benar berkelanjutan. Hal ini selaras dengan temuan Nursini (2020) bahwa kontribusi UMKM pada kemiskinan bekerja terutama melalui mekanisme penyerapan tenaga kerja, serta Munawara et al. (2025) yang mengidentifikasi stagnasi UMKM akibat minimnya akses pembiayaan, keterbatasan keterampilan digital, dan lemahnya dukungan pemasaran. Maka dari itu, diperlukan peningkatan kualitas inovasi bukan sekadar penambahan jumlah unit usaha agar kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Bantul dapat dioptimalkan.

3.2 Digitalisasi UMKM: Potensi Dan Kesenjangan Adopsi

Sebagai upaya mendorong transformasi tersebut, pemerintah Kabupaten Bantul bersama Dinas Koperasi dan UKM DIY telah mengembangkan tiga instrumen digitalisasi UMKM yang terintegrasi. Instrumen pertama adalah SiDAKUI (Sistem Informasi Data Perdagangan, Koperasi, UKM dan Industri), yaitu platform pendataan dan monitoring UMKM secara digital yang dikelola oleh DKUKMPP Bantul, dinyatakan secara resmi sebagai langkah strategis dalam mewujudkan satu data Perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM di Kabupaten Bantul (sidakui.bantulkab.go.id).

Instrumen kedua adalah GAMPIL (Gerakan Membantu Perizinan Langsung), yang dikembangkan sebagai perluasan layanan simplifikasi perizinan usaha bagi pelaku UMKM, mencakup konsultasi perizinan khususnya di daerah pelosok dan kantong kemiskinan, dikelola oleh DPMPTSP Bantul (Bantul Smart City, 2021). Instrumen ketiga adalah SiBakul (Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan UKM), platform pembinaan, pengembangan usaha, dan pemasaran digital yang dikelola oleh Dinas Koperasi UKM DIY.

Penelitian Maulidasari, C. D., & Damrus (2024) menyimpulkan bahwa SiBakul telah menciptakan pembinaan yang terstruktur, terpadu, dan mudah diakses sebagai bentuk digitalisasi modern dalam mewujudkan smart economy (JISIP UNJA, 2024). Ketiga program ini membentuk ekosistem kebijakan digital yang secara konseptual selaras dengan prinsip inovasi inklusif yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis teknologi.

Namun, di balik ketersediaan infrastruktur digital tersebut terdapat kesenjangan adopsi yang sangat kritis dan inilah titik paling lemah dalam rantai inovasi menuju pertumbuhan berkelanjutan.

PT BPR Bank Bantul mengungkapkan bahwa dari sekitar 96.360 unit UMKM yang terdaftar di Bantul, baru sekitar 3.681 unit atau 3,82% yang memanfaatkan platform daring untuk memasarkan produknya (PT BPR Bank Bantul, 2025). Dengan demikian, lebih dari 96% UMKM Bantul belum mengoptimalkan inovasi pemasaran digital sebagai jalur peningkatan omzet. Kondisi ini mengindikasikan hambatan struktural yang secara langsung membatasi kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan PDRB daerah, sekaligus menegaskan pandangan OECD (2021) bahwa potensi digitalisasi UMKM hanya akan terealisasi apabila didukung ekosistem pendampingan yang kuat dan literasi digital yang memadai.

3.3 Analisis Triple Bottom Line: Mengukur Keberlanjutan Pertumbuhan

Penerapan kerangka Triple Bottom Line Elkington (1997) terhadap ekosistem UMKM Bantul bertujuan menguji apakah pertumbuhan ekonomi yang tercatat PDRB tumbuh 5,04% pada 2024 (BPS Bantul, 2024) dan kemiskinan turun dari 12,27% menjadi 11,54% dapat dikategorikan sebagai pertumbuhan yang benar-benar berkelanjutan, yakni yang memenuhi dimensi profit, people, dan planet secara simultan. Hasil analisis menunjukkan capaian yang tidak merata. Dimensi ekonomi (profit) menunjukkan tren positif melalui pertumbuhan jumlah UMKM dan kontribusinya terhadap PDRB.

Dimensi sosial (people) bahkan menjadi aspek paling kuat, ditunjukkan oleh tingginya penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Dimensi sosial (people) merupakan capaian terkuat (Dari, 2024). UMKM Bantul menyerap 481.187 tenaga kerja lokal (Sedata Sebantul, 2025) dan berkontribusi pada penurunan kemiskinan secara konsisten. Program GAMPIL turut memperluas partisipasi ekonomi masyarakat di wilayah rentan (Bantul Smart City, 2021). Dimensi lingkungan (planet) merupakan dimensi paling lemah. Belum terdapat integrasi standar lingkungan secara sistematis dalam kebijakan maupun praktik UMKM. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan keberlanjutan, di mana pertumbuhan ekonomi belum diimbangi dengan perhatian terhadap aspek lingkungan.

3.4 Implementasi Kebijakan Inovasi UMKM Bantul: Perspektif George Edwards III

Untuk memahami mengapa capaian inovasi UMKM Bantul belum optimal secara implementatif, penelitian ini menggunakan kerangka implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980) yang memetakan empat variabel penentu keberhasilan implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Seluruh analisis bertumpu pada kajian dokumen (Bowen, 2009) terhadap sumber-sumber sekunder yang telah terverifikasi.

Pertama, variabel komunikasi. Penyampaian kebijakan inovasi UMKM Bantul telah berlangsung melalui berbagai saluran inkubasi digitalisasi DKUKMPP Bantul (Antara News Yogyakarta, 2022), Bootcamp Akademi Wirausaha Muda oleh PT BPR Bank Bantul (2025), serta dorongan resmi go digital hingga go internasional (Pemerintah Kabupaten Bantul, 2023). Namun, saluran-saluran tersebut cenderung menjangkau segmen UMKM yang sudah relatif aktif dan melek teknologi. Rendahnya adopsi pemasaran digital yang hanya mencapai 3,82% (PT BPR Bank Bantul, 2025) mencerminkan bahwa pesan kebijakan belum terdistribusi secara merata ke seluruh kelompok sasaran.

Kedua, variabel sumber daya. Persoalan pada variabel ini bukan pada ketersediaan infrastruktur platform SiDAKUI, GAMPIL, dan SiBakul secara formal telah beroperasi melainkan pada insufisiensi kapasitas pendampingan lapangan. DKUKMPP Bantul dituntut menjangkau lebih dari 96.000 unit UMKM (Leon, 2025) dengan jumlah pendamping yang terbatas, sehingga program pembinaan tidak mampu menyentuh lapisan usaha terbawah. Kondisi ini diperparah oleh minimnya akses pembiayaan dan rendahnya keterampilan digital pelaku usaha mikro yang belum tertangani secara struktural (Munawara et al., 2025).

Ketiga, variabel disposisi. Berbeda dengan dua variabel sebelumnya, disposisi di level pimpinan menunjukkan kondisi yang relatif kuat. Kepala DKUKMPP Bantul secara terbuka menyatakan komitmen terhadap digitalisasi sebagai strategi daya saing produk lokal (Antara News Yogyakarta, 2022), didukung oleh kebijakan resmi Pemerintah Kabupaten Bantul (2023) dan kerja sama Kemenkum DIY dengan Dinas Koperasi Bantul dalam bidang kekayaan intelektual UMKM (2025).

Titik lemahnya terletak pada transmisi komitmen tersebut ke jajaran pelaksana lapangan yang belum berjalan efektif sebuah pola yang diidentifikasi sebagai implementation gap sistemik dalam kebijakan digitalisasi UMKM di Indonesia (Jurnal Media Akademik, 2025). Keempat, variabel struktur birokrasi. Kelemahan paling mendasar terletak pada fragmentasi kelembagaan SiDAKUI yang dikelola DKUKMPP Bantul, GAMPIL oleh DPMPTSP Bantul, dan SiBakul oleh Dinas Koperasi UKM DIY masing-masing beroperasi dalam domain kewenangan yang terpisah tanpa SOP lintas-OPD yang mengikat. Absennya mekanisme koordinasi yang terdokumentasi ini membuka celah duplikasi program dan ketidakselarasan data antarlembaga. Meskipun SiBakul terbukti efektif pada level platform tunggal (Maulidasari & Damrus, 2024), integrasi sinergis antartetiga platform belum terwujud dan inilah kekosongan struktural yang paling langsung melemahkan kapasitas implementasi kebijakan secara keseluruhan.

3.5 Sintesis: Menuju Ekosistem Inovasi UMKM Yang Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Integrasi temuan dari ketiga kerangka analisis rantai kausalitas inovasi UMKM, Triple Bottom Line Elkington (1997), dan implementasi kebijakan Edwards III (1980) menunjukkan bahwa inovasi UMKM Bantul telah berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, namun belum memenuhi kriteria keberlanjutan yang holistik. Tiga hambatan sistemik menjadi penjelasnya, yaitu rendahnya difusi inovasi digital hanya 3,82% UMKM, lemahnya komponen keberlanjutan lingkungan, serta fragmentasi dan keterbatasan kapasitas implementasi kebijakan di lapangan.

Akar dari ketiganya merujuk pada belum optimalnya penerapan prinsip sustainable innovation sebagai orientasi bersama seluruh aktor kebijakan yakni inovasi yang secara serentak mendorong pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan kelestarian lingkungan. Platform SiDAKUI, GAMPIL, dan SiBakul, meskipun inovatif secara konseptual, belum dilengkapi mekanisme evaluasi berkala berbasis data (Jurnal Media Akademik, 2025), sehingga kelemahan pada variabel komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi sebagaimana diidentifikasi kerangka Edwards III tidak tertangani secara sistemik.

Kajian Dari (2024) mengonfirmasi bahwa praktik bisnis berkelanjutan berbasis TBL pada UMKM DIY masih berada pada level sedang, yang secara keseluruhan mempertegas pandangan OECD (2021) bahwa digitalisasi UMKM hanya akan berdampak berkelanjutan apabila ditopang ekosistem kebijakan yang komprehensif dan inklusif secara struktural.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan tiga temuan utama terkait peran inovasi UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Bantul. Inovasi yang meliputi pengembangan produk, desain kemasan, digitalisasi proses produksi, serta pemasaran daring terbukti memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini tercermin dari pertumbuhan PDRB sebesar 5,04% pada tahun 2024, dengan sektor industri pengolahan sebagai kontributor utama, serta penurunan tingkat kemiskinan dari 12,27% menjadi 11,54%. Namun demikian, perlambatan penurunan kemiskinan dan rendahnya rata-rata omzet menunjukkan bahwa kualitas pertumbuhan tersebut belum optimal. Analisis menggunakan pendekatan Triple Bottom Line menunjukkan adanya ketimpangan dalam dimensi keberlanjutan. Dimensi ekonomi (profit) dan sosial (people) berkembang relatif baik, dengan dimensi sosial sebagai yang paling dominan, sementara dimensi lingkungan (planet) masih belum terintegrasi secara sistematis dalam kebijakan inovasi UMKM. Kondisi ini menimbulkan defisit keberlanjutan yang berpotensi melemahkan fondasi pertumbuhan jangka panjang. Dari sisi implementasi kebijakan, analisis berdasarkan kerangka Edwards III mengungkap tiga kelemahan struktural utama, yaitu terbatasnya jangkauan komunikasi kebijakan, rendahnya kapasitas pendampingan di lapangan, serta lemahnya koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan program digitalisasi UMKM. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan empat langkah strategis, yaitu perluasan literasi dan pendampingan digital, penguatan koordinasi lintas-OPD

melalui SOP dan evaluasi berbasis data, integrasi aspek lingkungan dalam program pembinaan UMKM, serta pengembangan sistem monitoring berbasis PDRB sektoral untuk mengukur kontribusi inovasi secara berkala.

Reference

- Antara News Yogyakarta. (2022, April 19). *Pemkab Bantul Jaring Pelaku UMKM Untuk Difasilitasi Pemasaran Digital*. <https://Jogja.Antaranews.Com/Berita/547401/Pemkab-Bantul-Jaring-Pelaku-Umkm-Untuk-Difasilitasi-Pemasaran-Digital>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul. (2022–2025). *Data Dan Statistik Kemiskinan Kabupaten Bantul*. <https://Bantulkab.Bps.Go.Id>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul. (2024). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bantul Menurut Lapangan Usaha 2020–2024*. <https://Bantulkab.Bps.Go.Id>
- Bantul Smart City. (2021). *GAMPIL: Gerakan Membantu Perizinan Langsung*. Pemerintah Kabupaten Bantul. <https://Smartcity.Bantulkab.Go.Id/Dimensi/Quick/980.Html>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis As A Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th Ed.)*. SAGE Publications.
- Dari, W. (2024). Praktik Bisnis Berkelanjutan UMKM Rumah BUMN Yogyakarta Berdasarkan Triple Bottom Line. *Jurnal Atma Sosiologika*. <https://Ojs.Uajy.Ac.Id/Index.Php/Jas/Article/View/8673>
- Databoks/Katadata. (2026, Februari 20). *PDRB ADHB Di Kabupaten Bantul Menurut Sektor Pada 2024*. <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Ekonomi-Makro/Statistik/55d6c4633946baa/Sektor-Utama-Penggerak-Perekonomian-Di-Kabupaten-Bantul-Pada-2024>
- DKUKMPP Bantul. (2025, Agustus 25). *Updating Data Pelaku Usaha Mikro*. <https://Dkukmpp.Bantulkab.Go.Id/News/Updating-Data-Pelaku-Usaha-Mikro>
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line Of 21st Century Business*. Capstone Publishing.
- Freeman, C. (1987). *Technology Policy And Economic Performance: Lessons From Japan*. Pinter Publishers.
- JISIP UNJA. (2024). Pengembangan UMKM Melalui Inovasi Sibakul Di Kabupaten Bantul Dan Kabupaten Sleman Untuk Mewujudkan Smart Economy. *Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi*. <https://Online-Journal.Unja.Ac.Id/Jisip/Article/View/32431>
- Jurnal Media Akademik. (2025, November). Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Pemerintah Terhadap Digitalisasi UMKM. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11). <https://Jurnal.Mediaakademik.Com/Index.Php/Jma/Article/Download/3249/2561/9303>
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY. (2025, Januari 13). *Kemenkum DIY Dan Dinas Koperasi Bantul Jalin Kerja Sama Tingkatkan Kekayaan Intelektual UMKM*. <https://Jogja.Kemenkum.Go.Id/Berita-Utama/Kemenkum-Diy-Dan-Dinas-Koperasi-Bantul-Jalin-Kerja-Sama-Tingkatkan-Kekayaan-Intelektual-Umkm>
- Khouroh, U., Sudiro, A., Rahayu, M., & Indrawati, N. K. (2021). The Mediating Role Of Digital Transformation On The Relationship Between Entrepreneurship Orientation And Performance Of Msmes. *Journal Of Asian Finance, Economics And Business*, 8(3), 675–684. <https://Doi.Org/10.13106/Jafeb.2021.Vol8.No3.0675>
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction To Its Methodology (4th Ed.)*. SAGE Publications.
- Leon, Y. (2025, November 17). UMKM Bantul Tembus 96.420 Unit, Jadi Penopang Ekonomi Daerah. *Harian Jogja*. <https://Jogjapolitan.Harianjogja.Com/Read/2025/11/17/511/1235951/Umkm-Bantul-Tembus-96420-Unit-Jadi-Penopang-Ekonomi-Daerah>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications.
- Lundvall, B.-A. (1992). *National Systems Of Innovation: Towards A Theory Of Innovation And Interactive Learning*. Pinter Publishers.
- Maulidasari, C. D., & Damrus. (2024). Pengembangan UMKM Melalui Platform Sibakul Dalam Mewujudkan Smart Economy. *JISIP UNJA*.
- Munawara, R. N., Rohmah, F., & Mashudi. (2025). Peran UMKM Dalam Kontribusi Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan: Studi Kasus Kabupaten Bangkalan. *Paraduta: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial*. <https://Ojs.Umada.Ac.Id/Index.Php/Paraduta/Article/View/951>
- Nelson, R. R. (Ed.). (1993). *National Innovation Systems: A Comparative Analysis*. Oxford University Press.
- Nursini, N. (2020). Micro, Small, And Medium Enterprises (Msmes) And Poverty Reduction: Empirical Evidence From Indonesia. *Development Studies Research*, 7(1), 153–166. <https://Doi.Org/10.1080/21665095.2020.1823238>
- OECD. (2021). *The Digital Transformation Of Smes*. OECD Publishing. <https://Doi.Org/10.1787/Bdb9256a-En>
- Pemerintah Kabupaten Bantul. (2023, Mei 31). *Bantul Dukung UMKM Naik Kelas*. <https://Bantulkab.Go.Id/Berita/Detail/5885/Bantul-Dukung-Umkm-Naik-Kelas.Html>
- Porter, M. E. (1985). *Competitive Advantage: Creating And Sustaining Superior Performance*. Free Press.
- PT BPR Bank Bantul. (2025). *Bootcamp Akademi Wirausaha Muda, 19 Oktober 2025*. Kabupaten Bantul.
- Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change. *Journal Of Political Economy*, 98(5), S71–S102. <https://Doi.Org/10.1086/261725>
- Schumpeter, J. A. (1934). *The Theory Of Economic Development*. Harvard University Press.
- Sedata Sebantul. (2025). *Data Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul 2024*. <https://Data.Bantulkab.Go.Id>
- Sen, A. (1999). *Development As Freedom*. Oxford University Press.
- Sujarwo, S. (2022). *Pengaruh Inovasi Produk Dan E-Commerce Terhadap Kinerja UMKM Sentra Kerajinan Kulit Manding Bantul*. Universitas Terkait.
- Tambunan, T. T. H. (2019). *Recent Evidence Of The Development Of Micro, Small And Medium enterprises in Indonesia*. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 9(1), 18. <https://doi.org/10.1186/s40497-018-0140-4>